E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 1151 - 1170
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

Strategi Komunikasi Persuasif BBKSDA dalam Menyosialisasikan Pengalihan Fungsi Cagar Alam Mutis ke Taman Nasional Mutis Timau

Roky Konstantin Ara
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
E-Mail: roky192konstanti@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional Mutis Timau menimbulkan dinamika sosial serta resistensi dari masyarakat adat Fatumnasi yang memiliki keterikatan ekologis dan kosmologis dengan kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi komunikasi persuasif BBKSDA Nusa Tenggara Timur dalam mensosialisasikan kebijakan alih fungsi kawasan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan paradigma interpretif. Data primer dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif dan wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap enam informan yang dipilih secara purposif. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi serta kanal digital BBKSDA NTT. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan interpretasi menggunakan kerangka retorika Aristoteles: ethos, pathos, dan logos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi BBKSDA NTT berbasis segmentasi khalayak, dengan kombinasi pendekatan kelompok formal dan interaksi interpersonal informal seperti anjangsana dan kunjungan door-to-door. Unsur ethos dibangun melalui legitimasi kelembagaan dan keterlibatan petugas lokal; pathos melalui narasi budaya “Mutis sebagai Ibu Orang Timor”; dan logos melalui penjelasan rasional terkait zonasi, hak akses tradisional, serta peluang ekonomi berbasis pariwisata berkelanjutan. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran dan kondisi geografis, rendahnya kepercayaan akibat konflik historis serta pengaruh informasi eksternal, serta kelemahan prosedural berupa sosialisasi yang terlambat dan ketidakjelasan implementasi batas zonasi yang masih dinegosiasikan.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi Persuasif, BBKSDA NTT, Taman Nasional Mutis Timau, Masyarakat Adat, Hambatan Komunikasi.

PENDAHULUAN

Perubahan status kawasan konservasi dari Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional Mutis Timau tidak hanya merupakan keputusan administratif di bidang kehutanan, tetapi juga proses sosial yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat adat. Kawasan Mutis memiliki nilai ekologis sebagai ruang konservasi, namun pada saat yang sama menjadi ruang hidup, ruang ekonomi, dan ruang kultural bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat adat Desa Fatumnasi memandang Mutis sebagai bagian dari identitas dan sumber kehidupan, terutama karena hubungan mereka dengan sumber air, kayu bakar, lokasi ritual, dan praktik pemanfaatan alam yang berlangsung turun-temurun. Kondisi tersebut membuat kebijakan alih fungsi kawasan membutuhkan strategi komunikasi yang tidak berhenti pada penyampaian informasi formal, tetapi juga mampu membangun pemahaman dan kepercayaan.

Dalam kerangka kebijakan konservasi, perubahan dari Cagar Alam ke Taman Nasional membuka ruang pemanfaatan terbatas untuk kepentingan wisata, pendidikan, penelitian, dan pengelolaan berbasis zonasi. Pemerintah memandang perubahan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat pengelolaan kawasan dan memberi ruang manfaat ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat adat, perubahan status kawasan juga menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan akses terhadap air, kayu bakar, tempat penggembalaan, dan situs adat. Kesenjangan antara logika legal-formal pemerintah dan pengalaman hidup masyarakat inilah yang menjadikan komunikasi persuasif BBKSDA NTT penting untuk dikaji.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi konservasi memerlukan penyesuaian terhadap karakter masyarakat lokal. Andani (2022) menemukan bahwa komunikasi BBKSDA Riau dalam perlindungan satwa liar membutuhkan saluran yang tepat dan konsistensi penyampaian pesan. Indriyati et al. (2022) menekankan pentingnya komunikasi lingkungan yang partisipatif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ardiyanti et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi persuasif melalui sosialisasi dan media sosial belum selalu efektif apabila masyarakat tidak merasakan manfaat langsung. Sementara itu, Azi et al. (2024) menjelaskan bahwa

resistensi masyarakat adat dapat muncul ketika kebijakan publik tidak dikomunikasikan secara partisipatif sejak tahap awal.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini menempatkan pengalihan fungsi Cagar Alam Mutis sebagai kasus komunikasi kebijakan konservasi yang melibatkan masyarakat adat dengan relasi kultural kuat terhadap kawasan. Fokus artikel ini bukan pada promosi wisata atau pelestarian kawasan secara umum, melainkan pada strategi komunikasi persuasif BBKSDA NTT dalam menyosialisasikan perubahan fungsi kawasan serta hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Dengan demikian, artikel ini mengisi ruang kajian komunikasi persuasif pemerintah dalam konteks masyarakat adat dan kebijakan konservasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang dijawab dalam artikel ini adalah: bagaimana strategi komunikasi persuasif BBKSDA NTT dalam menyosialisasikan pengalihan fungsi Cagar Alam Mutis ke Taman Nasional Mutis Timau, dan hambatan apa saja yang muncul dalam proses komunikasi tersebut? Tujuan artikel ini adalah menganalisis strategi komunikasi persuasif BBKSDA NTT dengan menggunakan kerangka Retorika Aristoteles serta mengidentifikasi hambatan komunikasi yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan alih fungsi kawasan.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi Komunikasi Persuasif

Strategi komunikasi merupakan perencanaan terarah untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Smith (2021) memandang strategi komunikasi sebagai proses yang mencakup penetapan tujuan, identifikasi audiens, penyusunan pesan, dan pemilihan saluran komunikasi. Dalam konteks organisasi publik, strategi komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan, mengurangi kesalahpahaman, dan mendukung pencapaian tujuan kelembagaan (Cornelissen, 2023). Oleh karena itu, strategi komunikasi perlu dilihat sebagai rangkaian keputusan tentang siapa yang menjadi sasaran, siapa yang menyampaikan pesan, pesan apa yang dikemas, saluran apa yang digunakan, serta bagaimana respons publik dipahami.

Komunikasi persuasif merujuk pada usaha terencana untuk memengaruhi sikap, keyakinan, atau perilaku audiens secara sukarela. Perloff (2023) menegaskan bahwa efektivitas persuasi dipengaruhi oleh karakteristik sumber pesan, kualitas pesan, saluran komunikasi, dan karakteristik audiens. Dalam konteks kebijakan konservasi, komunikasi persuasif tidak cukup hanya menyampaikan aturan, tetapi harus menjelaskan alasan kebijakan, menjawab kekhawatiran masyarakat, dan menyesuaikan pesan dengan nilai sosial-budaya audiens.

Retorika Aristoteles

Retorika Aristoteles digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami daya persuasi pesan. Aristoteles (2007) menjelaskan bahwa persuasi dibangun melalui tiga unsur utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos mengacu pada kredibilitas komunikator, termasuk keahlian, integritas, dan niat baik terhadap audiens. Pathos berkaitan dengan kemampuan pesan menyentuh emosi, nilai, dan pengalaman audiens. Logos merujuk pada kekuatan argumentasi rasional, bukti, sebab-akibat, dan penjelasan logis dalam pesan.

Dalam penelitian ini, ethos digunakan untuk menganalisis bagaimana BBKSDA NTT membangun kredibilitas melalui legalitas kelembagaan, pejabat resmi, petugas lapangan, penyuluh, dan personel lokal. Pathos digunakan untuk membaca bagaimana pesan sosialisasi menghubungkan kebijakan konservasi dengan nilai budaya masyarakat, terutama narasi 'Mutis adalah Ibu Orang Timor'. Logos digunakan untuk menilai bagaimana BBKSDA menjelaskan dasar hukum, sistem zonasi, akses masyarakat, dan potensi manfaat ekonomi dari Taman Nasional Mutis Timau.

Sosialisasi Kebijakan Konservasi dan Masyarakat Adat

Sosialisasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan membangun pemahaman, penerimaan, dan dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Dalam isu konservasi, sosialisasi memiliki posisi strategis karena kebijakan kawasan tidak hanya berhubungan dengan perlindungan ekosistem, tetapi juga berdampak pada akses dan praktik hidup masyarakat. BBKSDA sebagai unit

pelaksana teknis pemerintah memiliki peran sebagai agen sosialisasi yang menjembatani kebijakan negara dengan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Masyarakat adat memiliki relasi historis, kultural, dan spiritual dengan wilayahnya. UNDRIP menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka (United Nations, 2007). Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) menekankan bahwa konsultasi harus dilakukan secara bebas, didahulukan sebelum kebijakan berjalan, dan berdasarkan informasi yang memadai (Ketaren & Prawira, 2024). Dalam konteks Mutis, prinsip ini relevan karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi tentang manfaat Taman Nasional, tetapi juga kepastian mengenai akses, zonasi, dan perlindungan ruang adat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan paradigma interpretif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami strategi komunikasi persuasif BBKSDA NTT dari sudut pandang para aktor yang terlibat, baik pihak lembaga, pemerintah desa, tokoh adat, informan ahli, maupun masyarakat yang mengalami langsung proses sosialisasi. Objek penelitian ini adalah strategi komunikasi persuasif BBKSDA NTT dalam menyosialisasikan pengalihan fungsi Cagar Alam Mutis ke Taman Nasional Mutis Timau serta hambatan komunikasi yang muncul dalam proses tersebut.

Subjek penelitian terdiri atas enam informan yang dipilih secara purposif. Informan mencakup perwakilan BBKSDA NTT sebagai informan kunci, informan ahli dari bidang komunikasi, kepala desa, tokoh adat, serta dua informan masyarakat dengan sikap yang berbeda terhadap kebijakan. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam proses sosialisasi atau dalam dinamika sosial kebijakan pengalihan fungsi kawasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, studi dokumen, dan penelusuran kanal digital resmi BBKSDA NTT. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai strategi komunikasi, isi pesan, saluran sosialisasi, serta

hambatan yang dihadapi. Observasi nonpartisipatif dilakukan untuk melihat kondisi sosial masyarakat dan ruang-ruang komunikasi informal di Desa Fatumnasi. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, dasar hukum, dan data pendukung lainnya. Penelitian dilaksanakan pada Januari-April 2026.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2022), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumen, dan data digital. Data kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka Retorika Aristoteles, yaitu ethos, pathos, dan logos, untuk membaca daya persuasi strategi komunikasi BBKSDA NTT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Persuasif BBKSDA NTT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi persuasif BBKSDA NTT tidak berdiri pada satu bentuk kegiatan sosialisasi, tetapi tersusun melalui beberapa aspek yang saling berkaitan. Strategi tersebut mencakup penetapan dan segmentasi khalayak, pemilihan komunikator, penyusunan dan pengemasan pesan, serta pemilihan saluran dan teknik komunikasi. Komunikasi formal dan informal tidak diposisikan sebagai strategi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan komunikasi yang digunakan untuk menjangkau kelompok sasaran yang berbeda.

Pada aspek penetapan sasaran, BBKSDA NTT membagi khalayak berdasarkan kedudukan sosial dan jangkauan komunikasi. Kelompok perwakilan seperti camat, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dijangkau melalui forum formal. Pada tingkat rumah tangga, komunikasi dilakukan melalui pendekatan interpersonal oleh petugas lapangan dan penyuluh. Pola ini menunjukkan bahwa BBKSDA berusaha menggunakan struktur sosial lokal sebagai jalur komunikasi awal, sekaligus membuka ruang pendekatan langsung kepada warga.

Strategi pemilihan komunikator dilakukan melalui pelibatan pejabat BBKSDA, petugas lapangan, penyuluh, dan personel lokal. Pejabat BBKSDA membawa otoritas kelembagaan dalam menjelaskan dasar hukum dan tujuan kebijakan, sedangkan

petugas lokal membantu menerjemahkan pesan kelembagaan ke dalam bahasa yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam kerangka ethos, kredibilitas BBKSDA dibangun melalui legalitas institusi dan kedekatan sosial komunikator. Namun, kredibilitas formal belum otomatis menghasilkan penerimaan apabila masyarakat masih memiliki pengalaman historis yang kurang baik dengan petugas lapangan.

Strategi penyusunan dan pengemasan pesan dilakukan melalui empat muatan utama. Pertama, pesan legal-institusional yang menjelaskan dasar hukum, kewenangan pemerintah, dan perbedaan antara Cagar Alam dan Taman Nasional. Kedua, pesan teknis mengenai zonasi dan kemungkinan pemanfaatan terbatas. Ketiga, pesan sosial-kultural melalui narasi 'Mutis adalah Ibu Orang Timor' dan penghormatan terhadap ruang ritual adat. Keempat, pesan manfaat ekonomi melalui potensi pariwisata berkelanjutan. Narasi budaya memperlihatkan unsur pathos karena menyentuh nilai spiritual masyarakat, sedangkan penjelasan hukum, zonasi, dan manfaat ekonomi memperlihatkan unsur logos.

Strategi pemilihan saluran dan teknik komunikasi dilakukan melalui kombinasi forum formal, penyuluhan, tatap muka langsung, anjangsana, kunjungan door-to-door, media elektronik, dan media sosial. Forum formal digunakan untuk menjangkau kelompok perwakilan, sedangkan komunikasi interpersonal digunakan untuk membangun kedekatan dan menjelaskan pesan secara langsung kepada masyarakat. Media elektronik dan media sosial disebut sebagai saluran pendukung, tetapi dalam konteks Desa Fatumnasi, komunikasi tatap muka tetap menjadi saluran yang paling penting karena memungkinkan dialog, klarifikasi, dan pembentukan kepercayaan.

Pendalaman Empat Aspek Strategi Komunikasi

Pada strategi penetapan dan segmentasi khalayak, BBKSDA NTT menempatkan kelompok perwakilan sebagai pintu awal sosialisasi. Kelompok ini terdiri atas camat, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki otoritas sosial serta kemampuan untuk meneruskan pesan kepada warga. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa BBKSDA tidak memandang masyarakat sebagai massa yang homogen, melainkan sebagai komunitas yang memiliki struktur sosial, hierarki

pengaruh, dan mekanisme perwakilan. Dalam konteks masyarakat adat, pengakuan terhadap tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi penting karena legitimasi pesan tidak hanya bergantung pada lembaga pengirim pesan, tetapi juga pada pihak yang dianggap sah oleh komunitas lokal.

Strategi pemilihan komunikator memperlihatkan kombinasi antara komunikator legal-institusional dan komunikator lokal. Pejabat BBKSDA berperan memberikan legitimasi formal karena mereka membawa otoritas hukum dan kewenangan kelembagaan. Petugas lapangan, penyuluh, dan personel lokal berperan menerjemahkan pesan kelembagaan ke dalam bahasa sosial yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, strategi pemilihan komunikator tidak hanya bertumpu pada status jabatan, tetapi juga pada kedekatan sosial, penguasaan konteks lokal, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal dengan warga.

Strategi penyusunan dan pengemasan pesan dilakukan melalui beberapa lapis muatan pesan. Pesan pertama bersifat legal-institusional, yaitu penjelasan bahwa perubahan fungsi kawasan memiliki dasar hukum dan berada dalam kewenangan pemerintah. Pesan kedua bersifat teknis, terutama mengenai perbedaan Cagar Alam dan Taman Nasional serta pengelolaan berbasis zonasi. Pesan ketiga bersifat sosial-kultural, yaitu penggunaan narasi bahwa Mutis merupakan ibu bagi orang Timor. Pesan keempat bersifat sosial-ekonomi, yaitu penjelasan mengenai peluang wisata, peningkatan kunjungan, dan kemungkinan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.

Temuan dari informan ahli memperkuat bahwa pesan sosialisasi seharusnya tidak hanya disusun dari sudut pandang lembaga, tetapi juga berdasarkan pemetaan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pesan yang efektif perlu menjawab kebutuhan dan kecemasan warga secara langsung. Informasi mengenai manfaat Taman Nasional akan lebih kuat apabila disertai penjelasan yang berimbang mengenai potensi risiko, dampak terhadap akses sumber daya, serta langkah antisipasi yang disiapkan. Dengan kata lain, pesan persuasif yang baik tidak hanya mengajak masyarakat menerima kebijakan, tetapi memberi dasar informasi yang cukup agar masyarakat dapat memahami konsekuensi kebijakan secara utuh.

Narasi budaya "Mutis adalah Ibu Orang Timor" menjadi salah satu bentuk pengemasan pesan yang penting karena menghubungkan agenda konservasi dengan sistem nilai masyarakat. Narasi ini memperlihatkan bahwa BBKSDA tidak hanya menggunakan bahasa administratif, tetapi juga berusaha memasuki kerangka budaya masyarakat. Akan tetapi, narasi budaya tersebut perlu diikuti oleh informasi teknis yang jelas. Apabila pesan kultural tidak disertai jaminan mengenai akses terhadap air, kayu bakar, dan lokasi ritual, maka narasi tersebut berisiko dipandang sebagai bahasa simbolik yang belum menjawab persoalan hidup sehari-hari.

Strategi pemilihan saluran dan teknik komunikasi menunjukkan bahwa BBKSDA menggunakan kombinasi saluran langsung dan saluran bermedia. Saluran langsung terdiri atas forum formal, tatap muka, penyuluhan, anjangsana, dan kunjungan door-to-door. Saluran bermedia meliputi media elektronik dan media sosial yang disebut sebagai sarana pendukung penyebaran informasi. Dalam masyarakat adat yang masih kuat dengan komunikasi langsung, saluran tatap muka memiliki posisi strategis karena memungkinkan proses klarifikasi, dialog, dan pembentukan kepercayaan secara lebih personal.

Teknik anjangsana dan door-to-door menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan seremonial dalam forum resmi, tetapi juga sebagai upaya membangun relasi. Teknik ini penting karena sebagian masyarakat mungkin tidak aktif berbicara dalam forum formal, tetapi lebih terbuka ketika ditemui dalam ruang komunikasi yang lebih personal. Dalam catatan lapangan, ruang komunikasi informal seperti lopo, kios kecil, dan pelataran rumah warga juga menjadi tempat masyarakat bertukar informasi dan membentuk pendapat tentang perubahan status kawasan. Oleh karena itu, strategi komunikasi BBKSDA perlu membaca ruang-ruang sosial informal ini sebagai bagian dari ekologi komunikasi masyarakat Fatumnasi.

Tabel 1. Pemetaan Strategi Komunikasi Persuasif BBKSDA NTT

Aspek Strategi	Temuan Penelitian	Analisis Retorika
Penetapan dan segmentasi khalayak	Sasaran dibagi menjadi kelompok perwakilan	Menunjukkan penyesuaian audiens; daya persuasi

	(camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat) dan masyarakat tingkat rumah tangga.	bergantung pada pemerataan komunikasi.
Pemilihan komunikator	Pejabat BBKSDA, petugas lapangan, penyuluh, dan personel lokal dilibatkan dalam sosialisasi.	Ethos dibangun melalui legalitas lembaga dan kedekatan komunikator lokal.
Penyusunan dan pengemasan pesan	Pesan dikemas melalui dasar hukum, zonasi, penghormatan nilai adat, narasi budaya, dan manfaat ekonomi.	Pathos tampak pada narasi budaya; logos tampak pada argumentasi hukum, zonasi, dan manfaat.
Saluran dan teknik komunikasi	Forum formal, penyuluhan, tatap muka, anjangsana, door-to-door, media elektronik, dan media sosial digunakan sebagai saluran dan teknik.	Saluran langsung memperkuat dialog; media digital berfungsi sebagai pendukung.

Sumber: Olahan peneliti, 2026

Ethos, Pathos, dan Logos dalam Strategi Komunikasi

Analisis Retorika Aristoteles menunjukkan bahwa daya persuasi BBKSDA NTT bertumpu pada hubungan antara ethos, pathos, dan logos. Ethos tampak pada upaya BBKSDA menghadirkan pejabat dan petugas lokal sebagai komunikator. Legalitas kelembagaan memberi dasar kredibilitas formal, sedangkan petugas lokal memberi kedekatan bahasa dan sosial. Akan tetapi, ethos BBKSDA masih dipengaruhi oleh pengalaman historis masyarakat. Ketika sebagian warga merasa tidak dilibatkan atau memiliki pengalaman kurang baik dengan petugas lapangan, kredibilitas lembaga tidak cukup hanya dibangun melalui aturan hukum.

Pathos terlihat pada penggunaan narasi 'Mutis adalah Ibu Orang Timor'. Narasi ini penting karena masyarakat adat tidak memandang Mutis semata-mata sebagai kawasan hutan, tetapi sebagai sumber kehidupan dan ruang spiritual. Dengan memakai metafora ibu, BBKSDA berusaha menggeser makna Taman Nasional dari kebijakan pembatasan menjadi kebijakan perlindungan. Namun, pathos positif

tersebut belum sepenuhnya mengatasi pathos negatif berupa ketakutan kehilangan akses terhadap air dan kayu bakar. Bagi masyarakat, persoalan air dan kayu bakar lebih dekat dengan kebutuhan harian daripada janji manfaat wisata jangka panjang.

Logos dibangun melalui penjelasan dasar hukum, perbedaan fungsi Cagar Alam dan Taman Nasional, sistem zonasi, hak akses tradisional, dan peluang ekonomi pariwisata. Secara rasional, status Taman Nasional membuka ruang pemanfaatan terbatas yang sebelumnya lebih ketat dalam rezim Cagar Alam. Namun, kekuatan logos menjadi lemah apabila penjelasan zonasi belum konkret. Masyarakat membutuhkan informasi teknis mengenai batas zona, aktivitas yang diperbolehkan, akses terhadap sumber air, lokasi pengambilan kayu bakar, dan perlindungan lokasi ritual adat. Tanpa kejelasan tersebut, argumentasi hukum dan ekonomi sulit menjadi dasar penerimaan yang kuat.

Ethos dalam penelitian ini tidak hanya menunjuk pada legalitas BBKSDA sebagai lembaga negara, tetapi juga pada cara lembaga tersebut hadir di hadapan masyarakat. Legalitas kelembagaan memang memberikan dasar otoritas, namun kepercayaan masyarakat tidak otomatis terbentuk hanya karena komunikator memiliki status formal. Masyarakat adat menilai kredibilitas melalui pengalaman langsung, keterbukaan penjelasan, konsistensi kehadiran, serta kesediaan lembaga untuk mendengar aspirasi warga. Oleh karena itu, ethos BBKSDA perlu dipahami sebagai kredibilitas yang bersifat ganda, yakni kredibilitas formal dan kredibilitas relasional.

Kredibilitas formal tampak melalui penjelasan dasar hukum, kewenangan kementerian, dan perubahan status kawasan secara administratif. Kredibilitas relasional tampak melalui pelibatan petugas lokal, penyuluh, dan personel lapangan yang dapat berbicara dengan bahasa masyarakat. Keduanya saling melengkapi. Jika hanya mengandalkan kredibilitas formal, pesan berisiko terasa jauh dan birokratis. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan kedekatan lokal tanpa kejelasan otoritas, pesan dapat kehilangan kekuatan legal. Persuasi menjadi lebih kuat ketika otoritas kelembagaan dipadukan dengan kehadiran komunikator yang dekat dengan masyarakat.

Pathos dalam strategi BBKSDA tampak melalui usaha menyentuh emosi dan nilai budaya masyarakat. Narasi "Mutis adalah Ibu Orang Timor" bekerja sebagai metafora kultural yang menghubungkan hutan, air, kehidupan, dan identitas masyarakat. Narasi ini memiliki daya persuasi karena masyarakat tidak memandang Mutis semata-mata sebagai kawasan administratif, melainkan sebagai ruang hidup dan ruang spiritual. Dalam kerangka pathos, pesan konservasi menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan rasa memiliki, penghormatan terhadap leluhur, dan kewajiban menjaga sumber kehidupan.

Namun, pathos tidak selalu menghasilkan penerimaan apabila emosi yang hidup dalam masyarakat belum dibaca secara lengkap. Di satu sisi, masyarakat dapat tersentuh oleh narasi Mutis sebagai ibu. Di sisi lain, masyarakat juga membawa emosi berupa khawatir, curiga, dan takut kehilangan akses terhadap sumber daya dasar. Kekhawatiran terhadap air dan kayu bakar menunjukkan bahwa emosi masyarakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga material. Karena itu, strategi pathos perlu memadukan penghormatan terhadap nilai budaya dengan pengakuan terhadap kecemasan nyata masyarakat.

Logos dalam strategi BBKSDA tampak pada argumentasi mengenai dasar hukum, perbedaan Cagar Alam dan Taman Nasional, sistem zonasi, hak akses tradisional, dan peluang ekonomi dari pariwisata berkelanjutan. Secara rasional, perubahan dari Cagar Alam ke Taman Nasional dapat dipahami sebagai peluang karena status Taman Nasional membuka ruang pemanfaatan terbatas yang sebelumnya lebih dibatasi dalam rezim Cagar Alam. Argumentasi ini menjadi dasar penting untuk menjelaskan bahwa pengalihan fungsi kawasan tidak selalu berarti penutupan akses, melainkan pengaturan akses melalui sistem zonasi.

Kendati demikian, logos akan melemah apabila argumentasi rasional belum didukung oleh informasi teknis yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai batas zona, titik yang dapat diakses, jenis kegiatan yang diperbolehkan, serta mekanisme pengelolaan sumber daya yang mereka gunakan sehari-hari. Penjelasan mengenai peluang wisata juga membutuhkan perincian tentang kesiapan infrastruktur, distribusi manfaat, dan posisi masyarakat lokal dalam rantai ekonomi

wisata. Tanpa kejelasan tersebut, argumentasi mengenai manfaat ekonomi dapat dipahami sebagai janji umum yang belum menyentuh kebutuhan warga.

Hambatan dalam Proses Komunikasi

Penelitian ini menemukan tiga kelompok hambatan utama dalam proses komunikasi BBKSDA NTT. Pertama, hambatan teknis-struktural berupa keterbatasan anggaran, tenaga, waktu, dan luasnya wilayah. Hambatan ini memengaruhi intensitas sosialisasi formal serta kemampuan BBKSDA menjangkau masyarakat secara langsung dan berulang. Dalam konteks wilayah yang luas dan tersebar, komunikasi berbasis forum perwakilan menjadi pilihan praktis, tetapi pilihan tersebut berisiko membuat informasi tidak menjangkau semua warga secara merata.

Kedua, hambatan sosial-budaya muncul dalam bentuk perbedaan pemaknaan, penggunaan istilah teknis, rendahnya kepercayaan terhadap BBKSDA, pengalaman konflik sebelumnya, dan beredarnya informasi alternatif dari pihak luar. Istilah seperti alih fungsi, zonasi, kawasan pelestarian alam, dan taman nasional tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat apabila tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Selain itu, pengalaman masyarakat terhadap aturan Cagar Alam sebelumnya memengaruhi cara mereka menafsirkan kebijakan baru.

Ketiga, hambatan prosedural berkaitan dengan sosialisasi yang dianggap lebih banyak dilakukan setelah kebijakan ditetapkan, pola komunikasi yang masih bertumpu pada perwakilan, ketidakjelasan zonasi, serta belum adanya mekanisme umpan balik dan evaluasi yang terstruktur. Hambatan ini penting karena komunikasi persuasif tidak hanya membutuhkan pesan yang baik, tetapi juga proses yang memberi ruang bagi masyarakat untuk bertanya, mengoreksi informasi, dan menyampaikan kekhawatiran.

Tabel 2. Hambatan Komunikasi dalam Sosialisasi Pengalihan Fungsi Kawasan

Jenis Hambatan	Bentuk Hambatan	Implikasi Komunikasi
Teknis-struktural	Keterbatasan anggaran, tenaga, waktu, dan luas wilayah.	Frekuensi sosialisasi langsung menjadi terbatas

		dan jangkauan komunikasi tidak merata.
Sosial-budaya	Perbedaan pemaknaan, istilah teknis, krisis kepercayaan, konflik historis, dan informasi eksternal.	Pesan legal-formal berisiko ditafsirkan sebagai ancaman terhadap ruang hidup.
Prosedural	Sosialisasi terlambat, berbasis perwakilan, zonasi belum jelas, dan evaluasi belum terstruktur.	Masyarakat belum memperoleh kepastian informasi dan ruang dialog yang memadai.

Sumber: Olahan peneliti, 2026.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi persuasif BBKSDA NTT telah mencakup elemen dasar strategi komunikasi, yaitu penetapan sasaran, pemilihan komunikator, penyusunan pesan, dan pemilihan saluran. Pola tersebut sejalan dengan pandangan Smith (2021) bahwa strategi komunikasi harus mengintegrasikan tujuan, audiens, pesan, dan saluran. Namun, dalam konteks masyarakat adat, keberadaan elemen strategi belum otomatis menghasilkan penerimaan. Strategi perlu ditopang oleh proses partisipatif dan kejelasan informasi teknis agar masyarakat memiliki dasar yang cukup untuk memahami kebijakan.

Jika dibandingkan dengan penelitian Andani (2022), komunikasi lembaga konservasi membutuhkan konsistensi dan adaptasi saluran agar masyarakat dapat berpartisipasi. Dalam kasus Mutis, BBKSDA telah menggunakan forum formal dan komunikasi interpersonal, tetapi penerimaan tetap berbeda antar-informan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa intensitas komunikasi dan pengalaman memperoleh penjelasan langsung memiliki pengaruh besar terhadap pemaknaan masyarakat. Kepala desa dan tokoh adat yang memperoleh penjelasan langsung cenderung lebih menerima, sedangkan informan masyarakat yang merasa tidak memperoleh sosialisasi langsung tetap menunjukkan kekhawatiran.

Temuan ini juga sejalan dengan Indriyati et al. (2022), yang menegaskan pentingnya komunikasi lingkungan yang partisipatif dan kolaboratif. Dalam konteks Mutis, partisipasi tidak cukup diartikan sebagai kehadiran perwakilan dalam forum. Partisipasi perlu mencakup peluang bagi masyarakat terdampak untuk memahami dampak positif, dampak negatif, dan mekanisme antisipasi. Pandangan informan ahli dalam penelitian ini menegaskan bahwa pesan sosialisasi seharusnya disusun berdasarkan studi lapangan dan pemetaan kebutuhan masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya menonjolkan manfaat tetapi juga menjawab risiko.

Dibandingkan dengan penelitian Ardiyanti et al. (2024), komunikasi persuasif dalam isu lingkungan menjadi kurang kuat apabila manfaat yang dijanjikan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini tampak dalam konteks Fatumnasi, ketika narasi ekonomi pariwisata belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran masyarakat tentang air dan kayu bakar. Dengan demikian, pesan ekonomi perlu dibuat lebih kontekstual. BBKSDA perlu menjelaskan bagaimana pariwisata berkelanjutan akan dikaitkan dengan kebutuhan dasar, perlindungan hak akses, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan.

Temuan mengenai hambatan prosedural juga memperkuat hasil penelitian Azi et al. (2024) tentang risiko kebijakan top-down terhadap masyarakat adat. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan sejak tahap awal, komunikasi setelah kebijakan ditetapkan cenderung dipahami sebagai pemberitahuan, bukan dialog. Oleh karena itu, komunikasi persuasif dalam kebijakan konservasi membutuhkan pendekatan yang lebih awal, terbuka, dan berulang. Prinsip FPIC relevan untuk memperkuat kualitas komunikasi karena menekankan konsultasi yang bebas, didahulukan, dan berbasis informasi memadai.

Dengan demikian, strategi komunikasi BBKSDA NTT dapat dinilai telah memiliki kerangka yang tepat, tetapi masih perlu diperkuat pada level implementasi. Ethos perlu diperkuat melalui kehadiran komunikator yang konsisten dan dipercaya masyarakat. Pathos perlu diarahkan tidak hanya pada narasi budaya yang positif, tetapi juga pada pengakuan terhadap ketakutan masyarakat. Logos perlu diperkuat melalui informasi teknis yang jelas tentang zonasi, akses, dan mekanisme perlindungan hak masyarakat adat.

Implikasi Temuan terhadap Strategi Komunikasi Konservasi

Temuan penelitian ini memberi penegasan bahwa komunikasi konservasi di wilayah masyarakat adat tidak dapat diperlakukan sama dengan sosialisasi administratif biasa. Kebijakan konservasi menyentuh relasi masyarakat dengan tanah, air, hutan, leluhur, dan sumber penghidupan. Karena itu, strategi komunikasi perlu dimulai dari pemahaman terhadap struktur sosial, bahasa lokal, memori konflik, serta kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks Mutis, strategi yang hanya menekankan legalitas dan manfaat ekonomi belum cukup untuk menghasilkan penerimaan apabila belum disertai kepastian mengenai akses terhadap sumber daya yang menjadi tumpuan hidup warga.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengarah pada kebutuhan memperkuat komunikasi sebelum, selama, dan sesudah penetapan kebijakan. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah kebijakan diumumkan, tetapi sejak tahap perencanaan, pemetaan dampak, dan perumusan zonasi. Komunikasi yang dilakukan sejak awal akan memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami alasan kebijakan sekaligus menyampaikan pengetahuan lokal mereka. Hal ini penting karena masyarakat adat bukan sekadar penerima informasi, tetapi pemilik pengalaman ekologis yang dapat memperkaya desain pengelolaan kawasan.

Strategi komunikasi BBKSDA juga perlu mengembangkan mekanisme umpan balik yang lebih terstruktur. Forum formal dengan kelompok perwakilan tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan forum kecil pada tingkat dusun, diskusi rumah tangga, pertemuan dengan perempuan, kelompok muda, petani, peternak, dan pengguna langsung sumber daya hutan. Kelompok-kelompok tersebut memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda. Dengan membuka ruang komunikasi yang lebih berlapis, BBKSDA dapat memperoleh peta respons masyarakat yang lebih akurat dan tidak hanya bergantung pada suara elite lokal.

Pemanfaatan media digital juga perlu diarahkan secara lebih spesifik. Media sosial dapat digunakan bukan hanya untuk publikasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga untuk menyajikan informasi edukatif mengenai zonasi, hak dan larangan masyarakat, alur pengaduan, jadwal konsultasi, serta perkembangan proses

pengelolaan Taman Nasional Mutis Timau. Namun, media digital tetap harus diposisikan sebagai pendukung, bukan pengganti komunikasi tatap muka. Pada komunitas yang masih mengutamakan relasi personal dan komunikasi langsung, kehadiran petugas di lapangan tetap menjadi unsur utama dalam membangun kepercayaan.

Perbandingan dengan penelitian Andani (2022), Indriyati et al. (2022), Ardiyanti et al. (2024), dan Azi et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan dan konservasi selalu membutuhkan kombinasi antara informasi, partisipasi, dan kepercayaan. Penelitian Andani menekankan pentingnya konsistensi saluran komunikasi; Indriyati menekankan pendekatan partisipatif; Ardiyanti menunjukkan bahwa manfaat yang tidak dirasakan langsung dapat melemahkan persuasi; sedangkan Azi memperlihatkan risiko komunikasi top-down terhadap masyarakat adat. Artikel ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks Mutis, strategi komunikasi persuasif harus menggabungkan legalitas, budaya, relasi interpersonal, dan kejelasan teknis pengelolaan kawasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi persuasif BBKSDA NTT dalam menyosialisasikan pengalihan fungsi Cagar Alam Mutis ke Taman Nasional Mutis Timau dilakukan melalui empat aspek utama. Pertama, BBKSDA menetapkan dan membagi sasaran komunikasi melalui kelompok perwakilan dan masyarakat tingkat rumah tangga. Kedua, BBKSDA memilih komunikator dari unsur pejabat lembaga, petugas lapangan, penyuluh, dan personel lokal. Ketiga, BBKSDA menyusun pesan melalui orientasi legal-institusional, teknis-zonasi, sosial-kultural, dan ekonomi. Keempat, BBKSDA menggunakan saluran formal dan informal melalui forum perwakilan, penyuluhan, tatap muka, anjangsana, door-to-door, serta media pendukung.

Dalam analisis Retorika Aristoteles, ethos terlihat melalui legalitas kelembagaan dan pelibatan petugas lokal; pathos terlihat melalui narasi 'Mutis adalah Ibu Orang Timor' dan penghormatan terhadap nilai adat; sedangkan logos terlihat melalui penjelasan dasar hukum, sistem zonasi, akses masyarakat, dan manfaat ekonomi.

Meskipun demikian, daya persuasi strategi tersebut belum merata karena masih terdapat hambatan teknis-struktural, sosial-budaya, dan prosedural. Hambatan utama mencakup keterbatasan anggaran dan wilayah yang luas, rendahnya kepercayaan masyarakat, informasi alternatif dari pihak luar, sosialisasi yang belum sepenuhnya dilakukan sejak tahap awal, serta ketidakjelasan zonasi.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas dan fokus lokasi pada Desa Fatumnasi, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh masyarakat di kawasan Taman Nasional Mutis Timau. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan partisipatif, Focus Group Discussion, serta melibatkan perempuan, generasi muda, dan komunitas adat dari wilayah lain di sekitar Mutis. Secara praktis, BBKSDA NTT perlu memperluas komunikasi langsung, menyusun materi sosialisasi yang berimbang, menjelaskan zonasi secara konkret, dan membangun mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat adat terlibat secara lebih bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, N. P. (2022). Perencanaan komunikasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam upaya melindungi satwa liar di Provinsi Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Ardiyanti, I., Choiriyati, S., Azizah, M., & Sasora, F. (2024). Persuasive communication strategy of Bandar Lampung City Environmental Office in waste management. 2(2).

Aristoteles. (2007). On rhetoric: A theory of civic discourse (G. A. Kennedy, Ed.; 2nd ed.). Oxford University Press.

Azi, M. A., Samingan, & Se, B. R. S. (2024). Resistensi masyarakat adat Rendu terhadap pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo. SAJARATUN: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah, 9(2), 169-179.

Berkes, F. (2018). Sacred ecology (4th ed.). Routledge.

Bizzell, P., Herzberg, B., & Reames, R. (Eds.). (2020). The rhetorical tradition: Readings from classical times to the present (3rd ed.). Bedford/St. Martin's.

Cornelissen, J. (2023). Corporate communication: A guide to theory and practice (7th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Effendy, O. U. (2019). Ilmu komunikasi: Teori dan praktek (Cet. 29). PT Remaja Rosdakarya.

Fatem, S. M., Runtuboi, Y. Y., Fisher, M. R., Sufi, Y., Maryudi, A., & Sirimorok, N. (2023). Conservation policy, indigeneity, and changing traditional hunting practices in West Papua. Forest and Society, 7(2), 359-379. https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.27420

Gulbrandsen, I. T., & Just, S. N. (2020). Strategizing communication: Theory and practice (2nd ed.). Samfundslitteratur.

Indriyati, R., Munggaran, N. R. D., & Yudhakusuma, D. (2022). Pelestarian kawasan Gunung Guntur melalui pendekatan komunikasi lingkungan. Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(1), 111-122.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Menjadi Taman Nasional Mutis Timau. (2024). https://ksdae.kehutanan.go.id/

Ketaren, S. R. A., & Prawira, M. R. Y. (2024). Unheard voices: Analyzing non-compliance with the FPIC principle in protecting indigenous peoples' rights in Indonesia. Law, Development and Justice Review, 6(4), 478-502.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Perloff, R. M. (2023). The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21st century (8th ed.). Routledge.

Servaes, J. (Ed.). (2020). Handbook of communication for development and social change. Springer.

Smith, R. D. (2021). Strategic planning for public relations (6th ed.). Routledge.

Suminar, E., Pawito, Utari, P., & Kartono, D. T. (2022). The idea of a national park and environmental desacralization. Proceedings of the International

Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2022), 31-37. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_24

United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

West, R. L., & Turner, L. H. (2024). Introducing communication theory: Analysis and application (8th ed.). McGraw Hill.